

**Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dalam  
Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kabupaten Bogor**

**Yusi Srihartini**  
IAI Nasional Laa Roiba Bogor  
Yusisrihartini5@gmail.com

**Im Wasliman**  
Universitas Islam Nusantara Bandung  
iimwasliman@gmail.com

**Yosal Iriantara**  
Universitas Islam Nusantara Bandung  
Yosal.iriantara@gmail.com

**R Supyan Sauri**  
Universitas Islam Nusantara Bandung  
uyunsupyan@gmail.com

**ABSTRACT**

*The background of this research problem is the quality of learning in Early Childhood Education (PAUD) in Bogor Regency, which still does not meet the established standards. The aims of this study are to describe: 1. PAUD policy process in improving the quality of learning, 2. Policy analysis. 3. Policy implementation, 4. Policy evaluation, 5. Barriers to policy implementation, and 6. PAUD policy implementation results. This study used a qualitative approach and data collection techniques were carried out through interviews, observations and documentation studies with data sources from the Bogor Regency Education Office in the field of PNF PAUD. The results of the research show: 1. The PAUD policy process in improving the quality of learning is based on the Regional Regulation of Bogor Regency Number 6 of 2011 in Articles 5,6,7. 2. Analysis of PAUD Policy in Bogor Regency there are still many that are not in accordance with National education standards and infrastructure facilities are not optimal, 3. Implementation of PAUD Policies, with HI (Holistic Integrative) PAUD Action Plans / Programs Partnership The Bogor Regency Education Office always synergizes and partners with organizations/institutions/associations of similar groups, 4. Evaluation of PAUD policies using accreditation as a benchmark in the quality of learning and the quality of these institutions, 5. Barriers to implementing PAUD human resource policies are constrained by the imbalance in the number of PAUD institutions with supervisors as PAUD coaches. 6. The results of the implementation of PAUD policies in improving the quality of learning, namely the implementation of Integrative Holistic PAUD as a form of service to the community in improving the quality of learning.*

**Keywords: Policy, Early Childhood Education, Quality of Learning**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mutu pembelajaran Pendidikan Anak Usia (PAUD) di Kabupaten Bogor yang masih banyak belum memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini

untuk mendeskripsikan: 1. Proses Kebijakan PAUD dalam peningkatan mutu Pembelajaran, 2. Analisis Kebijakan. 3. Implementasi Kebijakan, 4. Evaluasi Kebijakan, 5. Hambatan implementasi kebijakan, dan 6. Hasil implementasi Kebijakan PAUD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan sumber data Dinas Pendidikan kabupaten Bogor bidang PAUD PNF. Hasil penelitian menunjukkan: 1. proses Kebijakan PAUD dalam peningkatan mutu pembelajaran berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 pada pasal 5,6,7. 2. Analisis Kebijakan PAUD di Kabupaten Bogor masih banyak yang belum sesuai dengan standar Nasional pendidikan serta sarana prasarana belum optimal, 3. Implementasi Kebijakan PAUD, dengan Rencana Tindakan / Program PAUD HI (Holistik Integratif) Kemitraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor senantiasa bersinergis dan bermitra dengan organisasi/lembaga/perhimpunan kelompok sejenis, 4. Evaluasi Kebijakan PAUD menggunakan akreditasi sebagai tolak ukur dalam mutu pembelajaran dan mutu lembaga tersebut, 5. Hambatan mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia PAUD terkendala dengan tidak seimbangnya jumlah lembaga PAUD dengan Penilik sebagai Pembina PAUD. 6. Hasil Implementasi Kebijakan PAUD dalam peningkatan mutu pembelajaran yaitu terselenggaranya PAUD Holistik Integratif sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan Anak Usia Dini, Mutu Pembelajaran**

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa : Tap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas merupakan bahan atau pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan maupun mengadakan standarisasi pendidikan. Dan hal ini mencakup kedalam komponen-komponen pendidikan baik dalam segi konsep, teknis maupun aplikasi yang tentunya berperan penting dalam keberhasilan dan kesuksesan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain itu, sistem pendidikan nasional juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan maupun manajemen pendidikan baik di tingkat nasional, daerah maupun sekolah. Yang semuanya bertujuan untuk menyiapkan maupun memproses sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Kebijakan pendidikan (Nugroho, 2008:36) diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan

pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Olsen dan Codd (Nugroho, 2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri. Karena sekali langkah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas mutu pendidikan dari tingkat satuan sampai nasional. Agar dampak negatif dapat dikurangi maka dapat diperlukan suatu efektivitas dan efisiensi dalam proses kebijakan pendidikan dengan memahami secara mendalam hakikat kebijakan pendidikan itu sendiri.

Beberapa masalah Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Bogor berdasarkan informasi dari beberapa penilik PNF di beberapa kecamatan adalah tingkat pendidikan guru PAUD masih banyak yang hanya lulusan SMP atau SMA, belum sesuai Standar Nasional Pendidikan, masih sepertiga anak usia 3 – 6 tahun yang belum mendapat layanan PAUD, pembelajaran PAUD yang seharusnya 80 % membangun sikap tapi masih fokus pada pembelajaran baca tulis hitung (Calistung) yang bernuansa akademik.

Istiqomah (2016) memaparkan orang tua sudah mulai menyadari pentingnya Pendidikan Anak sejak usia Dini dari usia lahir sampai delapan tahun adalah masa yang penting untuk kehidupan selanjutnya. Kesadaran orang tua ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah merealisasikan pentingnya masa usia dini dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta terbentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan hasil observasi dengan Penilik PNF, Himpaudi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang menjadi permasalahan PAUD saat ini : (1). Dalam Tingkat Pendidikan guru hanya 23 % yang berpendidikan strata1 (S1), sedangkan menurut Standar Nasional Pendidikan seharusnya guru PAUD baik formal maupun nonformal minimal S1 PAUD, Psikologi atau kependidikan. (2). Program dan lembaga PAUD masih banyak yang belum sesuai aturan standar PAUD. (3). Sepertiga dari anak usia 3-6 tahun masih banyak yang belum mendapat layanan PAUD. (4). Masih ada orangtua yang belum mendukung dan belum sejalan dengan lembaga PAUD dalam menumbuhkembangkan anak. (5). Suasana Pembelajaran PAUD akademis yang seharusnya 80 % membangun sikap, saat ini justru fokus pada pembelajaran baca tulis hitung ( calistung ) . (6). Masih kurangnya kesejahteraan dan keberadaan guru karena belum dianggap guru yang sebenarnya. (7). Dengan penghasilan dan Minimnya gaji guru PAUD sehingga mereka tidak mampu melanjutkan studinya di PG-PAUD. (8). Menjadi guru PAUD merupakan alternatif pekerjaan terakhir setelah pekerjaan lainnya tidak didapatkan. (9). Sebagian besar Guru PAUD adalah perempuan yang mempunyai kewajiban di rumah tangganya sebagai ibu dari anak-anaknya dan istri dari suaminya, sehingga pekerjaan guru PAUD tidak maksimal.

Dari beberapa permasalahan diatas perlu dilakukan penelitian untuk memahami Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Kabupaten Bogor, Studi Deskriptif pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi/pengamatan berpartisipatif, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang diwakili Kepala Seksi Kelembagaan dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNF, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati PAUD dari beberapa Kecamatan dengan menggali sumber dari beberapa Penilik PNF. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan untuk mengetahui dokumen tentang bagaimana kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Bogor. Analisis data dilakukan dengan cara mencatat hasil temuan lapangan, mengumpulkan data, menghubungkan data-data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan pendidikan dibutuhkan dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memberikan layanan pendidikan yang sebaik - baiknya kepada masyarakat agar kualitas SDM bangsa ini berkualitas. Untuk itu, kebijakan pendidikan yang dirumuskan itu harus sesuai kebutuhan prioritas masyarakat secara umum.

Kebijakan PAUD sebagai titik awal terhadap pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas memandang kebijakan penyelenggaraan kelembagaan PAUD menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian untuk mengembangkan kedisiplinan, kemandirian anak usia dini untuk menyerapkan ilmu pengetahuan secara optimal.

### **Proses Kebijakan PAUD dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran.**

Proses Agenda Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam ruang lingkup Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 pada pasal 5, disebutkan bahwa : (1). Pengelolaan Pendidikan merupakan pengaturan kewenangan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan; (2). Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah meliputi: a). Pengalokasian anggaran pendidikan ; b). Kebijakan ; c). Kurikulum ; d). Sarana dan Prasarana ; e). Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; f). Pengendalian Mutu Pendidikan ; dan g). Peran Serta masyarakat. (3) Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan juga Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menempatkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangan. Atas dasar itu semua tentunya dinas pendidikan Kabupaten Bogor dalam mensikapi berbagai permasalahan yang ada dilingkungan pendidikan khususnya PAUD tentunya dipandang perlu adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mampu memberikan solusi atau jawaban atas berbagai masalah yang ada.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menyusun rumusan kebijakan itu sendiri adalah sebagai berikut : (1). Dinas pendidikan melalui bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, melakukan proses pengambilan data/survei yang dilakukan oleh para penilik/pengawas PAUD/PNF yang bertugas di wilayah Kecamatan dalam ruang lingkup

Pemerintah Kabupaten Bogor. (2). Data yang dihimpun berupa kondisi/keadaan administrasinya, guru, siswa/peserta didik, infrastruktur, dan penunjang lainnya yang menjadi potensi serta permasalahan yang ada didalamnya. (3). Rumusan potensi dan masalah dibahas dalam rapat khusus pembahasan program kerja internal, yang kemudian ditetapkan suatu masalah yang dianggap sangat penting dan bersifat menyeluruh untuk diajukan dalam forum rapat pimpinan (muspimda) yang dipimpin oleh Bupati dan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dan pemangku kebijakan. (4). Dalam rancangan kebijakan berskala besar rumusan tersebut dibahas dalam sidang komisi bersama anggota dewan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan, sehingga terbitlah suatu kebijakan yang ditetapkan dengan bentuk Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati Bogor dalam hal ini menjadi satu dasar hukum bagi Dinas Pendidikan dalam merealisasikan rumusan kebijakan khususnya bagi jenjang PAUD.

Temuan di atas sejalan dengan konsep kebijakan. Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan - pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan - keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan, atau kantor pemerintah. (William N Dunn, 2003 : 132) dalam teori sistem yang dikemukakan Dunn dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu : Pelaku Kebijakan, Kebijakan Publik, dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Kebijakan Publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu Kebijakan Publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan - badan dan pejabat - pejabat pemerintah (Anderson, 1979 : 3)

## **Analisis Kebijakan PAUD dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran.**

Kondisi nyata menunjukkan bahwa Guru PAUD di Kabupaten Bogor, terutama pada jalur pendidikan nonformal memiliki variasi yang beragam secara kualifikasi maupun kompetensi. Masih ditemukan Guru yang berpendidikan dasar (SD atau SMP), namun demikian banyak pula pendidik yang memiliki tingkat pendidikan menengah (SMA atau SMK) dan sedikit sekali yang berpendidikan diploma dan sarjana, meskipun tidak relevan/sesuai dengan bidang pendidikan anak usia dini.

Di sisi lain, banyak Guru PAUD yang menjalankan tugasnya melebihi kewenangan yang seharusnya. Tidak jarang kita menemukan guru PAUD yang hanya tamatan SMP sudah berperan menjadi guru inti di lembaga PAUD tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya agar semua Guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan kewenangan yang diembannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi seharusnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Guru PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tiga tingkatan Guru PAUD (guru PAUD, guru pendamping dan guru pendamping muda) secara berkesinambungan dan berjenjang. Diklat tersebut meliputi diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir. Diklat dasar ditujukan untuk mempersiapkan pendidik dengan kompetensi minimal sebagai guru pendamping muda. Diklat lanjut ditujukan untuk mempersiapkan Guru dengan kompetensi minimal sebagai guru pendamping dan diklat mahir ditujukan untuk mempersiapkan Guru dengan kompetensi minimal sebagai Guru PAUD.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini analisis kebijakan menurut William N. Dunn dalam buku yang berjudul *Public Policy Analysis, An Introduction* (2003 :1) mengemukakan bahwa " *Policy analysis is a problem solving discipline that draws on theories, methods, and*

*substantive findings of the behavioral and social professions, and social and political philosophy*", sebagaimana aktivitas kompleks lainnya, maka ada beberapa cara untuk melakukan analisis suatu kebijakan yaitu dengan menggunakan multi disiplin ilmu, dimana selain dipergunakan metode dan teknik juga harus mengacu pada standar, aturan dan prinsip yang dianut.

Analisis kebijakan menunjuk pada lima jenis pertanyaan yaitu :1) *what is the nature of the problem for which a solution is sought ?*; 2) *Which of two or more courses of action should be chosen to solve the problem ?*; 3) *What are the outcomes of choosing that course of action ?*; 4) *Does achieving the outcomes contribute to solving the problem ?*; 5) *what future outcomes can be expected if other courses of action are chosen ?*. Jawaban atas kelima pertanyaan di atas merupakan komponen informational kebijakan, yang akan mengulas tentang masalah kebijakan, capaian kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan yang lebih disukai dan mengamati hasil dari kebijakan.

## **Implementasi Kebijakan PAUD dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran.**

Rencana Tindakan (Program PAUD) sesuai kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu meningkatnya program PAUD HI (Holistik Integratif). Holistik integratif adalah pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.

Holistik integratif tidak hanya mempelajari satu bidang pendidikan saja, tetapi juga pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak. Pada dasarnya, anak merupakan suatu totalitas yang utuh, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi hak anak, salah satunya adalah dengan menyekolarkannya di PAUD holistik integratif.

Untuk merealisasikan Paud HI tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan workshop penyusunan program kerja gugus kegiatan ini diikuti berbagai lintas Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) terkait pengelolaan Paud. SKPD yang teribat tidak hanya Disdik, melainkan hingga tingkat kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk susunan daftar dalam bentuk kegiatan, hingga evaluasi hasil monitoring. Program ini akan menyasar seluruh lembaga Paud di Kabupaten Bogor. Dengan menerapkan beberapa standar, untuk menjaga kualitas lembaga dan peserta didik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor khususnya Bidang PAUD PNF senantiasa bersinergis dan bermitra dengan organisasi / lembaga / perhimpunan kelompok sejenis, yang anggotanya merupakan pengelola, tenaga pendidik, yaitu : Himpaudi (Himpunan PAUD, IGTK (Ikatan Guru-Guru TK), melalui para petugas Penilik dalam mensosialisasikan semua program PAUD yang ada di kabupaten Bogor.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUDHI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Menurut Richard Gorton dan Scheneider *"Implementing involves administrators in the process of making sure that the plant is carried out as intended."* Artinya implementasi melibatkan seorang administrator pada proses memastikan rencana berjalan sesuai yang dikehendaki. Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tahap implementasi. Sebaik apapun kebijakan pendidikan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. (Halim ; 2008)

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

## **Evaluasi Kebijakan PAUD dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran.**

Tujuan Evaluasi kebijakan, ketika PAUD menjalankan akreditasi berarti sudah terjamin mutunya dengan akreditasi dan ada masa berlakunya, tidak selamanya PAUD itu kondisi, sarana dan prasarananya masih seperti semula, akan ada perubahan yang harus dievaluasi kembali, maka harus mengajukan kembali akreditasi untuk mengevaluasi dari kebijakan mutu PAUD, termasuk evaluasi kebijakan itu dengan Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Suatu kebijakan dibuat dengan proses untuk mencapai target atau sasaran yang dimaksud dengan melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan dilakukan dengan kajian dan riset sehingga mencapai kepada hasil yang dimaksud, sebagaimana yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam merealisasikan sebuah kebijakan tahapan evaluasi dilakukan dengan waktu dan jadwal tertentu dengan melibatkan pengawas lapangan yang dilakukan secara internal dan terprogram melalui para petugas pengawas pendidikan atau disebut dengan penilik yang tersebar di wilayah Kecamatan atau gugus tugas dalam lingkup Kabupaten Bogor.

Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Pelaksanaan tindak lanjut dari suatu analisis merupakan pemanfaatan hasil supervisi atau evaluasi atas kebijakan yang telah dibuat dan direalisasikan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Tindak lanjut dari hasil supervisi atau evaluasi akan dibahas dalam upaya peningkatan pembinaan, pembimbingan, pengarahan kepada guru-guru atau tenaga pendidik dengan memanfaatkan program

pengembangan keprofesian yang berkelanjutan serta memanfaatkan sarana organisasi perhimpunan guru-guru PAUD yang ada yaitu : HIMPAUDI, IGTK dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan terealisasinya kebijakan itu sendiri.

Selain dari pada itu dukungan dan dorongan dari Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan telah menetapkan berupa regulasi yang dibuat sebagai pedoman dengan baik dan tidak simpang siur atas tahapan kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang.

## **Hambatan dalam mengimplementasikan Kebijakan PAUD dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran.**

Pertumbuhan lembaga PAUD di Kabupaten Bogor berkembang pesat. Tetapi, sangat jarang pendidikannya yang lulusan sarjana PAUD ataupun psikologi. Tentunya kompetensi guru PAUD yang ideal masih sangat jauh dari harapan. Guru PAUD tidak sesuai dengan kompetensinya akan berdampak negatif pada pertumbuhan anak usia dini, pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenjang pendidikan yang akan di tempuh setelahnya. Dalam undang-undang No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik guru dijelaskan bahwa: Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007) Guru PAUD diisyaratkan bergelar S-1 PG-PAUD atau D-4 PAUD. Dalam realitasnya hingga sekarang guru-guru PAUD masih didominasi lulusan SMA dan sederajat dan hanya 38 % yang berpendidikan S-1, itu pun bukan S-1 PAUD.

Hambatan dalam implementasi kebijakan PAUD di Kabupaten Bogor masih terkendala dalam SDM yaitu jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Bogor dengan Penilik sebagai Pembina PAUD tidak seimbang jumlahnya, dari tiga ribu lembaga PAUD di Kabupaten Bogor hanya ada sekitar 40 Penilik yang membina PAUD. Tetapi walaupun dari kelembagaan PNF PAUD Dinas Pendidikan Bogor jumlah SDM yang terbatas mereka tetap berusaha memaksimalkan pembinaan PAUD sekabupaten Bogor dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop dan keterampilan guru PAUD untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas SDM bisa dilihat dari jumlah guru yang sebagian besar merupakan tenaga tidak terdidik (*unskilled labor*). Dengan pendidikan formal hanya SD, SMP, dan SMA. Sebuah kebijakan yang tepat apabila pemerintah ke depan lebih memfokuskan pada pembangunan SDM. Dengan SDM yang mumpuni maka akan meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merasakan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan sarana prasarana dan pembiayaan karena sarana prasarana adanya dalam Permendes,

kebijakan sarana prasarana adanya di desa dimana desa dengan anggaran desa bisa mengalokasikan sarana prasarana dan pembiayaan PAUD untuk meningkatkan mutu pembelaaran, tapi masih banyak kepala desa yang belum memahami ini, masih banyak kepala desa yang mengutamakan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan karena menganggap ini sebagai skala prioritas, sebenarnya desa memiliki kewenangan penuh dalam menyusun berbagai perencanaan, maka seharusnya desa menyusun perencanaan yang menjawab kebutuhan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Agar perencanaan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, maka pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan. Jika perencanaan itu terkait dengan Anak Usia Dini (AUD), maka pemerintah desa harus melibatkan kader posyandu, fasilitator, tutor PAUD, komite PAUD, lembaga pemerhati anak di desa, dll.

Dalam menyusun sebuah kebijakan tidak selamanya berjalan sesuai rencana, diantaranya ada beberapa hambatan yang mempengaruhi tidak terlaksananya kebijakan tersebut, diantaranya : 1). Keterbatasan anggaran atau sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor, mendesak pemerintah untuk merubah rencana umum pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. 2). Terjadinya keadaan darurat baik berupa bencana alam maupun bencana sosial yang juga akan mempengaruhi beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 3). Kebijakan politik mampu menentukan berjalannya proses pendidikan. Selain saling berhubungan pendidikan dan politik juga memiliki hubungan fungsional, lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Maka apabila politik tidak berjalan, perkembangan kegiatan pendidikanpun dapat mempengaruhi sehingga proses pendidikan tidak berjalan dengan baik, seperti berbagai aspek pembelajaran, kurikulum, dan bahan-bahan bacaan seringkali di arahkan pada kepentingan politik tertentu, dan dapat menjadi media sosialisasi politik. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompetensi dalam pendidikan maka akan memberi dampak negatif bagi perkembangan pendidikan.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas). Ruang lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, di antaranya: bayi (0-1 tahun), balita (2-3 tahun), kelompok bermain (3-6 tahun), dan sekolah dasar kelas awal (6-8 tahun).Perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Perkembangan setiap anak berbeda tergantung lingkungan tempat anak tinggal dan pengasuhan orang tua

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (motorik kasar dan halus), kecerdasan (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiitual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahapan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini (Adalia ; 2010)

Tujuan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai Tujuan Utama dan Tujuan Penyerta. *Tujuan Utama* untuk membntuk anak Indonesia yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada

masa dewasa. *Tujuan Penyerta* untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) disekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. (Abdulhak, Ishaq : 2002)

Anak usia Dini merupakan usia emas bagi seseorang dan keberhasilan pendidikan anak usia dini menjadi landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya, bila seorang anak mendapat pendidikan yang tepat maka anak itu memperoleh kesiapan belajar yang baik dan merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya.

## **Hasil Implementasi Kebijakan PAUD dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran**

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor PNF PAUD mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAUD. Sehingga dalam implementasinya senantiasa mengacu kepada ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian secara bertahap program dan kegiatan layanan PAUD Non Formal khususnya mengalami peningkatan-peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan seminar dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidik PAUD. Sehingga keberadaan program dan kegiatan layanan PAUD Non Formal secara komprehensif dapat diketahui, dipahami dan didalami oleh pihak-pihak yang berkompeten dan menangani secara langsung di lapangan (pendidik, tenaga pendidik dan pengelola PAUD)

Selain itu dipandang perlu diselenggarakan kegiatan pelatihan dasar untuk pendidik PAUD. Kegiatan diklat dasar dilakukan untuk mencapai kompetensi pendidik seperti yang tertuang pada permendiknas No 58 Tahun 2009, yaitu memiliki kompetensi dalam memahami dasar pendidikan anak usia dini, terampil dalam melaksanakan pelatihan, dan memiliki sikap dan perilaku sesuai kebutuhan psikologi anak.

Sebagai sebuah kabupaten yang dekat dengan ibukota, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki visi menjadi kabupaten termaju se-Indonesia. Demi mencapai visi tersebut, misi yang dilakukan antara lain meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau, serta meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk menyediakan layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau. Sasarannya adalah meningkatnya perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas. Selain itu juga berupaya memberikan jaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang merata dan berkualitas. Demikian pula dengan tersedianya layanan pendidikan nonformal, kesetaraan, dan keaksaraan fungsional bagi warga yang tidak terjaring pendidikan formal.

Misi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM kependidikan. Sasarannya adalah terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang. Selain itu juga meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kependidikan, sehingga terwujud tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan.

Guru yang tidak sesuai dengan kualifikasinya/kompetensinya akan mengakibatkan dampak yang tidak baik pada perkembangan PAUD. Pembelajaran di PAUD memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenjang pendidikan setelahnya. Bila guru tidak memiliki kompetensi di bidang PAUD tidak menutup kemungkinan akan terjadi mispersepsi dalam pelaksanaan pembelajaran yang dampaknya justru pada perkembangan anak.

Bila dilihat dari profil guru yang kebanyakan lulusan SMA tentunya kompetensi guru PAUD yang ideal masih jauh dari harapan. Hal ini tentu menjadi tantangan pemerintah daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan guru PAUD mengakibatkan pula rendahnya kualitas asuhan terhadap anak usia dini, karena masih rendahnya kualitas guru/ pendidik PAUD yang belum memenuhi standar minimal yaitu untuk menjadi pendidik PAUD harus berijazah minimal setara dengan program D-4 PGTK (Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak)

Realitanya dilapangan pendidikan bagi anak usia dini saat ini hanya diselenggarakan mengembangkan untuk kemampuan kognitifnya saja dan menjauhkan anak dari situasi budaya yang mengelilinginya. Hampir semua lembaga pendidikan anak usia dini menjadikan belajar menulis, membaca dan berhitung sebagai kegiatan inti. Orang tua dan guru seakan memaksakan harapan anak kepada anak untuk menjadi pintar secara akademik dan melupakan kodrat anak untuk tumbuh serta berkembang secara alami. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sumber daya manusia, salah satunya yaitu faktor tenaga pendidik atau guru yang memiliki andil cukup besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Ini dikarenakan guru bertindak sebagai agen pembelajaran dan langsung bertatap muka serta berinteraksi dengan siswa. Oleh karena itu perlu diadakan pembinaan berupa pelatihan, seminar, atau workshop dengan tujuan meningkatkan kualitas guru untuk lebih memahami bagaimana mengoptimalkan siswa di sekolah.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Sudarwan Danim (2007 ; 56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu maka harus melibatkan beberapa faktor yang dominan, yaitu : 1). Kepemimpinan Kepala Sekolah ; Kepala Sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan pelayanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. 2). Guru ; Pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatnya kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut di terapkan di sekolah. 3). Siswa ; Pendekatan yang harus dilakukan anak sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali, sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 4). Kurikulum ; Kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu akan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. 5). Jaringan Kerjasama ; Jaringan kerjasama orangtua untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

*Proses Kebijakan PAUD* dalam meningkatkan mutu pembelajaran berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 pada Pasal 5, 6, dan 7. *Analisis Kebijakan PAUD* dalam peningkatan mutu pembelajaran melihat kondisi Guru PAUD di Kabupaten Bogor, terutama pada jalur pendidikan nonformal memiliki variasi yang beragam secara kualifikasi

maupun kompetensi, masih belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Guru PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tingkatan Guru PAUD. *Implementasi Kebijakan PAUD* dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran dengan rencana Tindakan (Program PAUD) sesuai kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yaitu meningkatnya program PAUD HI (Holistik Integratif). Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor khususnya Bidang PAUD PNF senantiasa bersinergis dan bermitra dengan organisasi / lembaga / perhimpunan kelompok sejenis, yang anggotanya merupakan pengelola, tenaga pendidik. *Evaluasi Kebijakan PAUD* dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam merealisasikan sebuah kebijakan tahapan evaluasi dilakukan dengan waktu dan jadwal tertentu dengan melibatkan pengawas lapangan yang dilakukan secara internal dan terprogram melalui para petugas pengawas pendidikan atau disebut dengan penilik yang tersebar di wilayah Kecamatan. *Hambatan dalam mengimplementasikan Kebijakan PAUD* di Kabupaten Bogor masih terkendala dalam SDM yaitu jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Bogor dengan Penilik sebagai Pembina PAUD tidak seimbang jumlahnya, walaupun dari kelembagaan PNF PAUD Dinas Pendidikan Bogor jumlah SDM yang terbatas mereka tetap berusaha memaksimalkan pembinaan PAUD sekabupaten Bogor dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop dan keterampilan guru PAUD untuk meningkatkan mutu pembelajaran. *Hasil Implementasi Kebijakan PAUD* dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran. Dalam hal penyelenggaraan PAUD yang berkualitas sebagaimana yang menjadi program Pemerintah dengan adanya program PAUD Holistik Integrasi (PAUD HI) memberikan daya tarik dan kepuasan kepada orangtua siswa, dengan adanya keterlibatan semua pihak selain Dinas Pendidikan juga bunda-bunda PAUD yang bertindak sebagai pemangku kebijakan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di usia ini. Bupati Kabupaten Bogor sekaligus sebagai bunda PAUD Kabupaten Bogor melakukan Gerakan "AYO KE PAUD" untuk memastikan tidak ada lagi anak usia dini yang langsung masuk Sekolah Dasar tanpa melalui jenjang PAUD.

Saran untuk pemangku kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada komponen-komponen penyelenggaraan yang belum memenuhi standar PAUD, SPM (Stadar Pelayanan Minimal) dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, untuk Penilik PNF sebagai Pembina PAUD Kecamatan Perlu adanya pelatihan pengembangan kompetensi kepada tenaga pendidik/kependidikan yang diadakan langsung oleh UPTD Pendidikan Kecamatan selaku penanggung jawab pendidikan di Kecamatan . Karena masih banyak nya tenaga pendidik/kependidikan yang belum sesuai dengan standart kualifikasi yang sudah ditentukan. Untuk Kepala Desa membuat perencanaan dan mengeluarkan dana desa khususnya yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) secara bertahap dan berkesinambungan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PAUD; pembiayaan operasional PAUD; dan pembayaran insentif guru dan pengelola PAUD yang masih berstatus pegawai Non PNS dengan tetap berkoordinasi pada Dinas Pendidikan kabupaten melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu layanan PAUD di setiap desa yang ada di kecamatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih disampaikan kepada seluruh responden dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Penilik PNF kecamatan, juga kepada Universitas Islam Nusantara (UNINUS) atas kesempatan meneliti Kebijakan PAUD dalam peningkatan Mutu Pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ishak. (2002). *Memposisikan Pendidikan Anak Dini Usia Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia. 03. 54 – 59.
- Arif, Noor Fuad. (2019). *Analisis Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (Vol 10), No 01
- Arifin, Ar-Raisul Karama, and Nur Ainy Fardana. (2014) *Peran Pendidik PAUD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Melalui Metode Pembelajaran Sentra dan Lingkaran*. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, no. 3.
- Arwildayanto, dkk, (2018) *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*, Bandung: Cendekia Press.
- Azyumardi, Azra (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi*. Jakarta: Kompas
- Daryanto. (2013). *Guru Profesional: Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdiknas. (2002). *Kecerdasan Spiritual Dalam Membantu Prilaku Anak*, Buletin PAUD Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini Edisi Perdana. Jakarta : Direktorat PAUD Ditjen PLSP
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
- Hadis, Abdul dan Nurhayati (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Haenilah, Een Y. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran PAUD*. Yogyakarta: Media Akademi..
- Hasbullah, Kebijakan Pendidikan (2015) *Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Ara & Imam Machali. (2012). *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Hijriati (2016) *Analisis Kompetensi Guru PAUD dalam pelaksanaan Pembelajaran Anak Usia Dini di TKIT Salman Alfarisi I Yogyakarta*. Tesis UIN Sunan Kalijaga
- Imron , Ali. (1995). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Imron, Ali (2010). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Istiqomah Laelatul (2016) *Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud*. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1 April 2016 : 57-65.
- Jalal, Fasli. (2002). *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya PADU*. Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia. 03. 9 – 18.
- Latif, Mukhtar dkk (2014). *Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Martini Jamaris. (2006) *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 104-105.
- Maskuri. (2017). *Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol 02, No 01.
- Melati, Sarah Davidson, Ali Khomsan, Hadi Riyadi, (2020). *Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 3-5 tahun di Kabupaten Bogor*, *Jurnal Gizi Indonesia*, Vol 08, No 02
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Mukminin, Amirul. (2002). *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. Semarang: UNNES Press.

- Najib, Moh, (2014). *Pendidikan Nilai*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Nanang Fattah (2012) *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution (1996), *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1992) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Pihatin, Eka. (2005) *Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)*. Jurnal [upi.edu/file/Eka\\_Prihatin,Pdf](http://upi.edu/file/Eka_Prihatin,Pdf). Di akses pada tanggal 12 November 2019.
- Prihatin, Eka. (2005) *Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)*. Jurnal [upi.edu/file/Eka\\_Prihatin,Pdf](http://upi.edu/file/Eka_Prihatin,Pdf). Di akses pada tanggal 12 November 2019.
- Purwakania, Aliah B (2006), *Psikologi Perkembangan Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rozi Sastra Purna, Arum Sukma Kinasih. (2015) *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta : PT Indeks
- Safritz, J.M and E.W. Russel, *Introduction Public Administration* (New York: Addison Education Publisher Inc)
- Sagala, Syaiful. (2007). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sagala, Syaiful, (2008) *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, Syaiful, (2009), *Menejemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, Edward (2015). *Total Quality Management In Education*. IRCISOD, Yogyakarta
- Santrock, W. Jhon. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 2007. Hlm.9.
- Sa'ud, Udin Syaefudin & Abid Syamsudin Makmun (2011). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Solehuddin, M, (1997). *Konsep Dasar Pendidikan pra Sekolah* . Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
- Sugiyono ( 2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Sujiono, Yuliani Nurani (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Supriadi, Dedi. (2002). *Memetakan Kembali Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Anak Dini Usia*. Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia. 03. 36 – 42.
- Suyadi. (2011) *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA Mendirikan, Mengelola, dan Mengembangkan PAUD*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafaruddin (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R, Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (2012) *Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasito, Hermawan (1992),*Pengantar Metodologi Pene;itian*, Jakarta: GramediaPustakaUtama.
- Wibowo, Edi (2004). *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta: Cipta Mandiri.
- Yoyon Bahtiar Irianto (2012),*Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yus, Anita (2011).*Model Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Media Group *Jurnal Ilmiah, Perspektif PAUD* (Vol. 1) Dirjend PAUDNI 2011.
- Zakiah Daradjat dkk (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Abdulhak, I. (2002). *Memposisikan Pendidikan Anak Dini Usia Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, 3, 54–59.
- Adalia, 2010. *Perkembangan Anak Usia Dini*, Jakarta, Grasindo

- Arif, Noor Fuad. (2019). *Analisis Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (Vol 10), No 01.
- Arifin, A.K., & Fardana, N.A. (2014). Peran Pendidik PAUD dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Melalui Metode Pembelajaran Sentra dan Lingkaran. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3(3), 188-198.
- Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W.T. (2018) *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto. (2013). *Guru Profesional: Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja*. Yogyakarta: Gava Media.
- Davidson, S.M., Khomsan, A., & Riyadi, H. (2020). Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 3-5 tahun di Kabupaten Bogor. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 8(2), 143-148. <https://doi.org/10.14710/jgi.8.2.143-148>.
- Depdiknas. (2002). Kecerdasan Spiritual Dalam Membantu Prilaku Anak. *Buletin PAUD Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini Edisi Perdana*. Jakarta: Direktorat PAUD Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hadis, A. & Nurhayati, B. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Haenilah, E.Y. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran PAUD*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Halim, Abdul Rahman, 2008. Aktualisasi implementasi kebijakan pendidikan pada madrasah swasta di Sulawesi Selatan. *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol 11 (1), Juni 2008
- Hasan, A.B.P. (2006). *Psikologi Perkembangan Islam: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Hijriati. (2016). *Analisis Kompetensi Guru PAUD dalam pelaksanaan Pembelajaran Anak Usia Dini di TKIT Salman Alfarisi I Yogyakarta*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Imron, A. (1995). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Imron, A. (2010). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irianto, Y.B. (2012). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Istiqomah, L. (2016). Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan PAUD. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(1), 57-65.

- Jamaris, M. (2006). *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Grasindo.
- Jalal, F. (2002). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya PADU. *Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*, 3, 9–18.
- Latif, M. (2014). *Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Maskuri, M. (2017). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(1), 78-91.  
<https://doi.org/10.35316/jpii.v2i1.64>
- Moleong, J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukminin, A. (2002). *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. Semarang: UNNES Press.
- Najib, M. (2014). *Pendidikan Nilai*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parsons, E.E. 1997. *Public Policy : An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. New York: Mc Grow Hill
- Poerwadarminta, W.J.S. (1992). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prihatin, Eka. (2005) *Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)*. Diakses dari:  
[https://jurnal.upi.edu/file/Eka\\_Prihatin.Pdf](https://jurnal.upi.edu/file/Eka_Prihatin.Pdf).
- Purna, R.S., & Kinasih, A.S. (2015) *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini: Menumbuh-kembangkan Botensi "Bintang" Anak di TK Atraktif*. Jakarta: Indeks.
- Sagala, S. (2007). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, S. (2008). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, S. (2009). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E.(2015). *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Santrock, W. J. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Sa'ud, U.S. & Makmun, A.S. (2011). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shafritz, J.M., & Russel, E.W. (2016). *Introducing Public Administration*. New York: Addison Education Publisher Inc.
- Solehuddin, M. (1997). *Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
- Sudarwan Danim, 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. ( 2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, Y.N. (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Supriadi, D. (2002). *Memetakan Kembali Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Anak Dini Usia*. *Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia*, 3, 36–42.
- Suyadi. (2011). *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA: Mendirikan, Mengelola, dan Mengembangkan PAUD*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 3 Nomor 2 (2021) 236-250 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: [10.47476/reslaj.v3i2.404](https://doi.org/10.47476/reslaj.v3i2.404)

Syafaruddin, S. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasito, H. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, E. (2004). *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta: Cipta Mandiri.

Yus, A.(2011). *Model Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Prenadamedia Gr